



Peran Organisasi Pimpinan Daerah Aisyiyah dalam Pembangunan Inklusif di Kabupaten Garut

Meli Amelia¹⁾, Rostiena Pasciana²⁾

Universitas Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

24012122037@uniga.ac.id¹⁾
rostiena_pasciana@fisip.uniga.ac.id²⁾

Abstrak

Ketidakmerataan pembangunan di Kabupaten Garut menunjukkan perlunya peran organisasi masyarakat dalam memperkuat praktik pembangunan yang inklusif. Penelitian ini mengkaji peran Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut dalam mendorong pembangunan berperspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan NVivo untuk pengodean, kategorisasi, dan penarikan tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDA Garut menjalankan tujuh dimensi peran organisasi masyarakat secara terpadu melalui program Balai Sakinah Aisyiyah, Sekolah Lansia Berdaya, BUEKA, Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan, serta pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Program tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas, kesejahteraan, dan partisipasi kelompok rentan. Namun, aspek pengawasan pembangunan dan pemeliharaan ketertiban masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa Aisyiyah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses layanan dasar yang sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa kontribusi PDA Garut turut mendorong tercapainya kesejahteraan kelompok rentan, dengan rekomendasi penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor serta keberlanjutan program.

Kata kunci: Aisyiyah; Inklusif; Kesejahteraan; Kolaborasi; Pembangunan

Abstract

Uneven development in Garut Regency indicates the need for the involvement of civil society organizations in strengthening inclusive development practices. This study examines the role of Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Garut in promoting development from a Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) perspective. The research employs a descriptive qualitative method using in-depth interviews, observations, and document analysis, with data analyzed through NVivo for coding, categorization, and theme identification. The findings reveal that PDA Garut performs seven integrated dimensions of civil society organization roles through programs such as Balai Sakinah Aisyiyah, Sekolah Lansia Berdaya, BUEKA, Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan, and employment training for persons with disabilities. These programs contribute to improving the capacity, welfare, and participation of vulnerable groups. However, aspects of development oversight and the maintenance of social order still require strengthening. The findings underscore that Aisyiyah serves as a strategic partner of the government in expanding access to basic services that align with community needs. The study concludes that the contributions of PDA Garut support the achievement of welfare among vulnerable groups and recommends strengthening cross-sectoral coordination, collaboration, and program sustainability.

Key words: Aisyiyah; Inclusive; Welfare; Collaboration; Development



PENDAHULUAN

Ketidakseimbangan pembangunan serta ketidakmerataan manfaatnya di Indonesia masih menjadi masalah serius yang membutuhkan pendekatan baru agar keadilan sosial dapat tercapai (Selan et al., 2024). Pentingnya isu ini tercermin dalam prinsip "*No One Left Behind*" yang menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas (difabel) harus tetap terlindungi dan tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan (Fauzi, 2025). Di Kabupaten Garut, dalam struktur penduduk pada tahun 2024 menunjukkan 26,19 persen merupakan anak-anak; 9,79 persen lansia; 49,5 persen perempuan secara keseluruhan (anak-anak hingga lansia); serta 615 orang disabilitas terlantar yang terjangkau layanan sosial dasar. Secara global, pembangunan inklusif dipandang sebagai strategi penting untuk mencapai keberlanjutan, karena menekankan pelayanan harus dapat diakses oleh setiap orang tanpa perlakuan berbeda (Pempatan et al., 2023).

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan ini wajibkan pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Danubrata, 2022). Di Kabupaten Garut sendiri, Peraturan Presiden tersebut diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan strategi penanggulangan kemiskinan) serta berbagai kebijakan sektoral yang berorientasi pada kelompok rentan. Namun, meskipun komitmen nasional dan daerah sudah jelas, implementasinya di daerah masih menghadapi hambatan. Hal ini dapat terlihat dari masih lebarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah dan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam memasukkan prinsip inklusif ke dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan (Naibaho & Siregar, 2023).

Kabupaten Garut, yang berada di Provinsi Jawa Barat, masih mengalami ketidakseimbangan capaian pembangunan yang terlihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut (2025), IPM Kabupaten Garut 2024 hanya mencapai 69,91 poin. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Garut pada posisi kedua terendah di Provinsi dan berada di bawah rata-rata Jawa Barat, yakni sebesar 74,92 poin. Permasalahan ini diperparah oleh tingginya angka kemiskinan yang mencapai 9,68 persen atau sekitar 259.322 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi layanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup layak masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Garut (BPS Kabupaten Garut, 2024).

Selain IPM yang rendah, perbandingan rumah tangga yang menempati rumah layak huni masih terbatas pada 34,61 persen pada tahun 2024, sementara keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menyebabkan layanan kesehatan belum mencapai tingkat optimal (Baihaqi, 2025). Namun demikian, terdapat pencapaian positif berupa penurunan prevalensi *stunting* dari 24,1 persen pada tahun 2023 menjadi 14,2 persen pada tahun 2024, yang merupakan hasil dari kolaborasi berbasis komunitas yang terkoordinasi dengan baik (News Redaksi, 2025). Dalam dinamika sosial tersebut, organisasi perempuan yang termasuk dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Garut hadir sebagai aktor signifikan dalam upaya pemberdayaan serta advokasi kelompok rentan. Capaian ini menunjukkan adanya sinergi yang efektif antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial dan kesehatan (Pasciana, et al., 2024).

Dari 62 organisasi perempuan yang termasuk dalam GOW, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Garut memiliki posisi strategis karena menjalankan program pemberdayaan perempuan secara terintegrasi hingga tingkat desa (Garut Satu Data, 2024). Dibandingkan dengan organisasi wanita Islam lain seperti Fatayat NU, yang lebih menekankan advokasi struktural berbasis tafsir progresif, dan Persistri, yang mengutamakan pendekatan kultural dakwah berbasis keluarga, PDA Garut menunjukkan keunggulan melalui kombinasi layanan pendidikan, kesehatan masyarakat, pendampingan kelompok rentan, serta penguatan ekonomi perempuan. Pendekatan tersebut diperkuat melalui kemitraan lintas sektor sehingga program yang dijalankan lebih terarah



dan memiliki jangkauan yang luas (Mimar, 2025).

Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) merupakan organisasi perempuan Muhammadiyah yang berfokus pada dakwah sosial, pemberdayaan, dan advokasi kelompok rentan melalui pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) (Azizah et al., 2022). Di Kabupaten Garut, PDA melaksanakan Program Inklusi sejak Maret 2022 dengan mendampingi perempuan rentan, lansia, dan penyandang disabilitas melalui 12 Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang mencakup kegiatan pendampingan, pemberdayaan, pendidikan, dan perlindungan bagi perempuan, dengan fokus pada persoalan keluarga, ekonomi, kesehatan, serta keadilan sosial di ke 12 BSA tersebut. Selain itu, PDA juga mengembangkan Sekolah Lansia Berdaya, *Daycare Lansia*, serta layanan edukasi dan pemberdayaan ekonomi seperti Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA), termasuk program Sijaka (Suami Siap Jaga Keluarga) (Papap, 2024). Upaya ini diperkuat kolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dan beberapa dinas lainnya bersama Klinik Muhammadiyah serta Klinik Darul Arqam yang menjadikan PDA Kabupaten Garut sebagai mitra strategis dalam pembangunan inklusif daerah (Milki, 2024).

Penelitian terdahulu mengenai pembangunan inklusif pada periode 2021–2025 umumnya menitikberatkan pada kebijakan pemerintah daerah dan desa, seperti peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan layanan sosial, serta pemenuhan hak kelompok marginal. Beberapa penelitian yang relevan, seperti Huripah et al. (2021) mengenai peran desa dalam menyediakan layanan inklusif, Selan et al. (2024) terkait keadilan sosial dalam pembangunan inklusif, dan Sujana et al. (2025) tentang pemberdayaan perempuan berbasis komunitas, menunjukkan bahwa fokus penelitian masih berada pada ranah struktural pemerintah. Di sisi lain, studi mengenai Aisyiyah pada rentang 2022–2024 lebih menyoroti pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan, gerakan sosial-keagamaan, serta isu kesetaraan gender, tanpa mengulras peran Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) sebagai aktor masyarakat sipil yang terlibat langsung dalam tata kelola pembangunan daerah (Hazim & Fihayati, 2022; Purwanti et al., 2023; Nur Kholisatun et al., 2024). Oleh karena itu, kontribusi PDA Garut dalam Program Inklusi mulai dari pelaksanaan kegiatan BSA, pendampingan keluarga, hingga penyediaan layanan sosial yang terintegrasi dengan pemerintah belum banyak diangkat dalam literatur, sehingga menghadirkan ruang penting bagi penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan peran Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Garut dalam pembangunan inklusif berperspektif *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan menggunakan Teori Herdiansah & Randi (2016) mengenai Peran Organisasi Masyarakat sebagai dasar analisis. Penjabaran ini menguraikan bagaimana peran PDA dalam mendukung pelaksanaan Program Inklusi, termasuk pola kerja sama yang dibangun bersama pemerintah daerah, serta kontribusi kegiatan tersebut terhadap peningkatan keberdayaan kelompok rentan. Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan akan data empiris yang menunjukkan peran organisasi perempuan dalam memperluas akses terhadap layanan sosial serta mendorong pembangunan yang inklusif di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji peran organisasi Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) dalam pembangunan inklusif di Kabupaten Garut. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Garut. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program pembangunan inklusif. Jumlah informan sebanyak 11 orang, terdiri atas 6 pengurus PDA Kabupaten Garut, termasuk Ketua PDA, Ibu Dra. Hj. Eti Nurul Hayati, M.Si., yang sekaligus sebagai ketua Program Inklusi, serta 5 penerima manfaat program pembangunan inklusif yang diadakan oleh PDA Garut. Informan tersebut diharapkan mewakili pelaksanaan program inklusif pada 175 Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) tingkat desa di Kabupaten Garut.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terhadap beberapa kegiatan PDA

Garut, serta studi dokumentasi yang mencakup arsip organisasi, laporan kegiatan, foto kegiatan, dan pemberitaan media massa. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang dimiliki organisasi, serta pemberitaan dari media massa. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak *NVivo* untuk melakukan proses pengodean, kategorisasi, dan penarikan tema penelitian. *NVivo* dipilih karena mampu mengelola data kualitatif dalam jumlah besar secara terstruktur serta memungkinkan penggabungan berbagai jenis data, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen visual, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pengolahan *NVivo*

Bagian hasil ini disusun berdasarkan interpretasi data yang diperoleh dari tiga visualisasi utama yang dihasilkan melalui pengolahan transkrip wawancara mendalam dengan pengurus PDA Garut yaitu *Word Cloud*, *Hierarchy Chart*, dan *Project Map*.

a. *Word Cloud*



Gambar 1. Word Cloud

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2025

Visualisasi pada Gambar 1 menunjukkan istilah-istilah yang paling sering muncul dalam wawancara dengan pengurus PDA Garut. Istilah tersebut memperlihatkan fokus organisasi dalam pembangunan inklusif. Dimana terdapat lima istilah dengan frekuensi tertinggi yaitu kesehatan, majelis, perempuan, pelatihan, dan masyarakat yang menandakan prioritas strategis PDA dalam memberikan layanan bagi kelompok rentan di Kabupaten Garut.

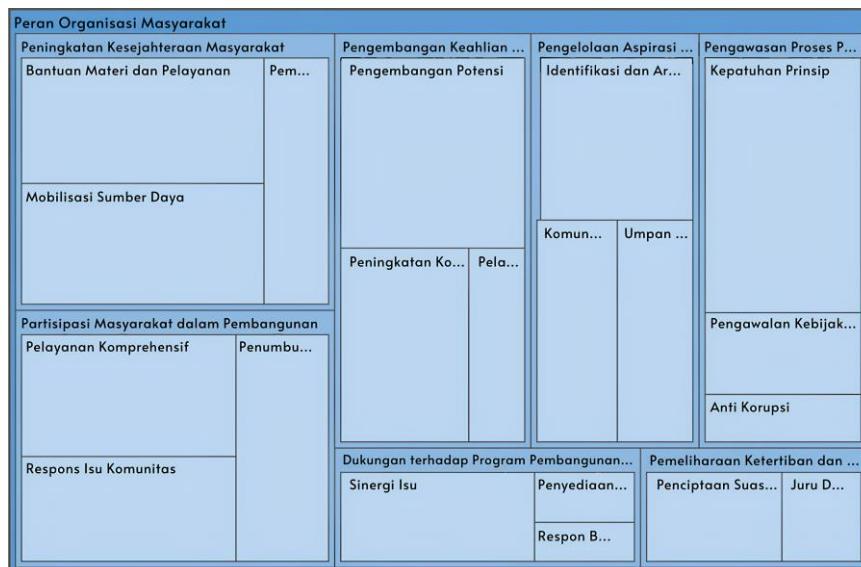
- 1) Bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas utama PDA Garut karena berhubungan langsung dengan permasalahan nyata di daerah. Pendirian 12 Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) di sejumlah desa percontohan berfungsi sebagai pusat layanan edukasi kesehatan, pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA), serta pendampingan keluarga. Inisiatif ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberhasilan terhadap penurunan angka *stunting* di Kabupaten Garut, dari yang awalnya 24,1% pada 2023 menjadi 14,2% pada 2024 (News Redaksi, 2025). Selain itu, program *Day Care Lansia* dan *Sekolah Lansia Berdaya* berkontribusi dalam menjaga kesehatan fisik dan mental lansia melalui kegiatan edukatif dan produktif. PDA Garut juga memperkuat layanan kesehatan melalui program *TB Care Aisyiyah* yang mencakup skrining, kunjungan rumah, pendampingan pengobatan, serta penyediaan rumah singgah bagi pasien yang memerlukan isolasi sementara (Hasmiati et al., 2021). Dengan demikian, upaya kesehatan berbasis komunitas di bawah PDA Garut dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
 - 2) Struktur majelis di PDA Garut membentuk struktur organisasi yang memungkinkan setiap program dijalankan secara sistematis sesuai dengan bidangnya. Dimana



terdapat tujuh majelis, yaitu Majelis Tabligh; Majelis Pembinaan Kader; Majelis Kesehatan; Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah; Majelis Kesejahteraan Sosial; Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan; serta Majelis Hukum dan HAM. Struktur tersebut diperkuat oleh tiga lembaga pendukung, yaitu Lembaga Budaya, Seni, dan Olahraga; Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana; serta Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah. Keterpaduan antara majelis dan lembaga ini memungkinkan pelaksanaan program yang lebih terfokus dan saling melengkapi, sehingga kegiatan dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi perempuan di Kabupaten Garut dapat berlangsung secara efektif tanpa tumpang-tindih.

- 3) PDA Garut menempatkan perempuan sebagai pusat penggerak organisasi dengan melibatkan mereka dalam kegiatan di BSA, pengelolaan PAUD dan TK, serta pelatihan keterampilan. Program kaderisasi dan pendampingan hukum dasar turut meningkatkan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan dan pemberdayaan komunitas. Dengan kemampuan yang lebih kuat, perempuan dapat berkontribusi lebih besar dalam mendorong kemajuan dan kemandirian masyarakat di lingkungannya.
- 4) Pelatihan menjadi strategi penting PDA Garut dalam meningkatkan kompetensi kelompok rentan di bidang kesehatan, ekonomi, dan kepemimpinan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menghasilkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pelatihan *digital marketing* dan program Sekolah Lansia Berdaya. Selain itu, pelatihan kader dan pendamping hukum dasar turut memperkuat kemampuan pendamping komunitas dalam melakukan advokasi dan mengelola program secara lebih efektif.
- 5) Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan program PDA Garut menjangkau warga secara langsung melalui BSA dan program Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah (BUEKA) yang fokus pada penguatan ekonomi keluarga. Di dalamnya, program "Siap Jadi Ayah Peduli Keluarga" (SIJAKA) berperan mendorong keterlibatan suami dalam membangun rumah tangga yang lebih kokoh dan sejahta, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyasar perempuan, tetapi juga anggota keluarga lain yang berperan penting. Kolaborasi dengan pemerintah, puskesmas, dan forum warga perempuan semakin memperluas jangkauan program serta memastikan manfaatnya dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

b. *Hierarchy Chart*



Gambar 2. *Hierarchy Chart*

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2025



Gambar 2 memperlihatkan bahwa PDA Garut menjalankan tujuh dimensi peran organisasi masyarakat secara terpadu, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pengembangan kapasitas, hingga pengawasan dan dukungan terhadap program pembangunan. Setiap dimensi saling melengkapi melalui aktivitas seperti pemberian layanan, penguatan kompetensi, penyaluran aspirasi, serta penciptaan lingkungan yang aman dan partisipatif. Untuk memperjelas keterkaitan antara peran-peran tersebut dengan praktik di lapangan, disajikan tabel yang merangkum bagaimana setiap dimensi dioperasionalkan oleh PDA Garut.

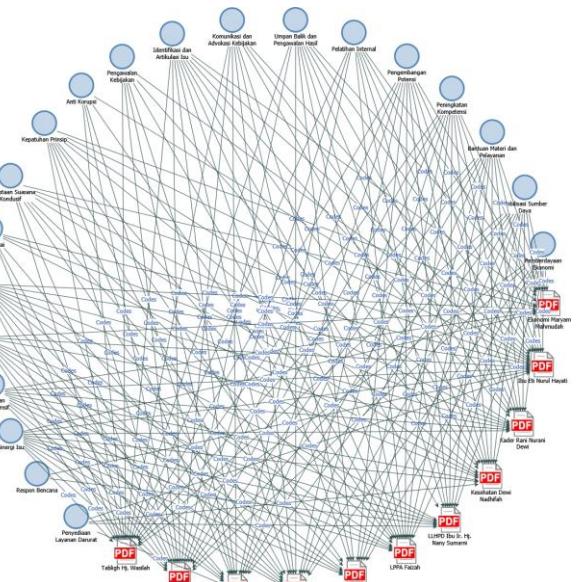
Tabel 1.
Keterkaitan Dimensi Peran Organisasi Masyarakat dengan Program PDA Garut

No	Dimensi Peran	Indikator Utama	Program PDA Garut	
1.	Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Identifikasi dan Artikulasi Isu; Komunikasi dan Advokasi Kebijakan; Umpan Balik dan Pengawalan Hasil	Pelaksanaan Perempuan dan Kelompok Rentan, validasi <i>stunting</i> di BSA, kemudian hasilnya direkomendasikan pada Bappeda dan DP2KBP3A.	Musrenbang
2.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Pemberdayaan Ekonomi; Mobilisasi Sumber Daya; Bantuan Materi dan Pelayanan	BUEKA melatih 120 perempuan, BSA memberi modal dan pendampingan bagi perempuan rentan.	
3.	Dukungan Terhadap Program Pembangunan	Respons Bencana; Penyediaan Layanan Darurat; Sinergi Isu	Mengedukasi mitigasi bencana, program lintas sektor agar masuk RAD SDGs.	
4.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Penumbuhan Semangat; Respons Isu Komunitas; Pelayanan Komprehensif	Melatih kader PDA yang terlibat di 36 Kecamatan dan menyediakan layanan di 12 BSA	
5.	Pengawasan Proses Pembangunan	Pengawalan Kebijakan; Kepatuhan Prinsip; Anti Korupsi	Dilakukan <i>monitoring</i> GEDSI, audit internal rutin program kegiatan, dan evaluasi RAD SDGs melalui forum <i>multi-stakeholder</i> .	
6.	Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan	Penciptaan Suasana Kondusif; Juru Damai	Dilakukan mediasi keluarga, pendampingan kasus KDRT dan edukasi hukum.	
7.	Pengembangan Keahlian dan Kapasitas Masyarakat	Pengembangan Potensi; Peningkatan Kompetensi; Pelatihan Internal	Pelatihan kader, menjadi fasilitator KGPP, serta fasilitator magang disabilitas	

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2025

Tabel 1 memperlihatkan bahwa PDA Garut menjalankan tujuh dimensi peran organisasi masyarakat melalui program yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Aspirasi masyarakat dikelola melalui Musrenbang perempuan dan kelompok rentan, sementara kesejahteraan ditingkatkan lewat pelatihan ekonomi, layanan lansia, dan dukungan bagi perempuan rentan. PDA juga mendukung program pembangunan melalui edukasi mitigasi bencana dan respons pandemi, memperkuat partisipasi melalui pelatihan kader dan layanan BSA, serta melakukan pengawasan lewat *monitoring* dan evaluasi kebijakan. Selain itu, ketertiban dijaga melalui mediasi dan pendampingan hukum, dan kapasitas masyarakat diperkuat lewat berbagai pelatihan dan fasilitasi.

c. *Project Map*



Gambar 3. Project Map

Sumber : Hasil Olah Peneliti 2025

Gambar 3 di atas menggambarkan hubungan antara dimensi peran organisasi, kode hasil analisis, serta dokumen sumber berupa hasil wawancara yang digunakan untuk mengidentifikasi pola kerja PDA Garut. *Node* lingkaran biru menunjukkan tema-tema utama yang merupakan indikator, seperti identifikasi isu, advokasi kebijakan, peningkatan kompetensi, pengembangan potensi, pelayanan komprehensif, respons terhadap isu komunitas dan bencana, dan lainnya. Sementara itu, *node* "Codes" berfungsi sebagai penghubung antara dokumen dan tema melalui pengodean NVivo, sedangkan gambar PDF di bagian bawah memperlihatkan dokumen hasil wawancara dan laporan yang menjadi landasan analisis. Kepadatan hubungan antarnode memperlihatkan bahwa satu dokumen dapat mendukung berbagai tema sekaligus, sehingga mencerminkan sifat kerja organisasi yang tidak terpisah-pisah.

Secara keseluruhan, *Project Map* ini menggambarkan bagaimana PDA Garut menjalankan perannya secara *multidimensional* dan saling berkaitan. Keterhubungan yang luas menunjukkan bahwa aktivitas organisasi berkontribusi pada sejumlah peran strategis, terutama dalam pengembangan kapasitas perempuan, penguatan advokasi, serta layanan sosial di tingkat komunitas. Melalui gambar ini, terlihat bahwa setiap program dan aktivitas PDA Garut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam mendukung tujuan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dimensi Peran Organisasi Masyarakat berdasarkan Herdiansah & Randi (2016)

a. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

PDA Garut mengumpulkan aspirasi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas melalui para kader dan kegiatan BSA. Data yang terkumpul disusun menjadi rekomendasi dan dibawa ke Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan agar suara kelompok rentan bisa tersampaikan dengan jelas. Melalui kerja sama dengan Bappeda dan DP2KBP3A, proses ini membantu pemerintah daerah memasukkan isu layanan dasar dan perlindungan sosial ke dalam rencana pembangunan. Cara kerja ini sejalan dengan temuan Pasciana, et al. (2024) yang menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, data terpilah, kepemimpinan lokal, dan dukungan relawan agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi sebuah kebijakan.



b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program Sekolah Lansia Berdaya yang dijalankan PDA berisi berbagai kegiatan, seperti senam otak, olahraga, pemeriksaan kesehatan, dan aktivitas luar ruang. Kegiatan ini membantu lansia tetap aktif secara fisik, mental, dan sosial sehingga pengetahuan kesehatan bertambah, kemandirian tumbuh, dan keterlibatan para lansia dalam kegiatan sosial tetap terjaga. Dampak positifnya terlihat dari jumlah pendaftar yang melebihi kuota. Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan konsep kapabilitas relasional dari Huripah et al. (2021) yang menekankan perlunya kerja sama lintas sektor, yaitu puskesmas, kader posyandu, dan pendamping keluarga, untuk menghasilkan layanan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

c. Dukungan terhadap Program Pembangunan

PDA Garut mendukung pembangunan kesehatan reproduksi remaja melalui Program *Like-R* bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), yaitu menyampaikan materi edukasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting*, konseling gizi dan psikologi, serta keterampilan perawatan diri. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas remaja, dan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan literasi kesehatan dan menurunkan risiko *stunting*. Pendekatan sebaya ini dinilai efektif karena membuat remaja lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Hal tersebut sejalan dengan temuan Pasciana, et al. (2024) mengenai kuatnya pengaruh komunikasi berbasis aktor lokal. Efektivitas ini juga diperkuat oleh penelitian Hazim & Fihayati (2022) yang menunjukkan peran organisasi perempuan, termasuk Aisyiyah, dalam promosi kesehatan preventif pada masa pandemi.

d. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Melalui Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan yang dilaksanakan bersama Bappeda serta DP2KBP3A, PDA Garut memastikan usulan berperspektif GEDSI masuk ke Rencana Pembangunan Daerah (Diskominfo Kabupaten Garut, 2024). Pendekatan ini membuat suara perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas lebih terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif GEDSI menekankan perlunya kebijakan yang memperhatikan kesetaraan *gender*, kebutuhan difabel, dan inklusi kelompok rentan sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada kelompok mayoritas. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif yang terlihat dalam studi kasus PKL Pantai Tedis oleh Selan et al. (2024), yang menunjukkan pentingnya ruang partisipasi formal agar kelompok terpinggirkan dapat mengalirkan aspirasi menjadi kebijakan.

e. Pengawasan Proses Pembangunan

PDA Garut melakukan pengawasan program kesehatan, perlindungan anak, dan keluarga sejahtera melalui laporan rutin dari Pimpinan Ranting Aisyiyah atau kader desa. Informasi yang didapatkan kemudian dibahas dalam forum evaluasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan adanya umpan balik yang dapat memperjelas sasaran serta melengkapi layanan dasar. Mekanisme pemantauan berbasis komunitas ini sejalan dengan temuan Huripah et al. (2021) yang menegaskan peran organisasi masyarakat sebagai pengawas operasional agar intervensi publik menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

f. Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan

PDA Garut menyediakan layanan mediasi keluarga dan pendampingan korban kekerasan melalui konselor BSA. PDA juga bekerja sama dengan kepolisian, Posbakum, dan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi hukum serta rujukan kasus. Gabungan upaya pencegahan dan pendampingan ini diharapkan dapat membantu menurunkan risiko kekerasan berulang dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Peran protektif ini selaras dengan temuan Hazim & Fihayati (2022) yang menunjukkan bagaimana Aisyiyah di Sidoarjo memberikan dukungan sosial dan perlindungan selama pandemi, sehingga menguatkan keterkaitan pendekatan komunal PDA dalam penanganan kekerasan.

g. Pengembangan Keahlian dan Kapasitas Masyarakat



PDA Garut mengadakan *Refreshment* Penyedia Layanan Kerja untuk meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai hak dan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN), 25 perusahaan dan mendorong tersedianya peluang magang serta kerja bagi penyandang disabilitas (Diskominfo Garut, 2024). PDA sebelumnya telah memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas, sementara Disnakertrans menegaskan kembali kewajiban perusahaan mempekerjakan minimal 1 persen tenaga kerja disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Melalui kegiatan ini, perusahaan, sekolah, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) diharapkan dapat membangun *link and match* agar keterampilan difabel sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Pimpinan Daerah Aisyiyah Garut berperan penting dalam memperkuat pembangunan inklusif melalui berbagai program yang menyasar perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, seperti Balai Sakinah Aisyiyah, Sekolah Lansia Berdaya, BUEKA, pelatihan pekerjaan untuk difabel, validasi *stunting*, dan Musrenbang Perempuan dan Kelompok Rentan. Kolaborasi dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, DP2KBP3A, Disnakertrans, serta *stakeholder* lainnya memperluas akses layanan dasar, peluang kerja, serta ruang partisipasi bagi kelompok rentan. Dampak program terlihat dari meningkatnya kapasitas individu dan bertambahnya kesempatan bagi kelompok yang sebelumnya kurang terlayani untuk terlibat dalam proses pembangunan.

PDA Garut menunjukkan kinerja kuat dalam pengembangan kapasitas, peningkatan kesejahteraan, perluasan partisipasi, dan penyaluran aspirasi melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan daerah. Sementara itu, aspek pengawasan pembangunan dan pemeliharaan ketertiban masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal sistem pemantauan dan jejaring penanganan kasus. Secara keseluruhan, PDA Garut telah berperan sebagai pendorong utama pembangunan daerah, meski tetap membutuhkan penguatan kelembagaan agar keberpihakan kepada kelompok rentan dapat dijalankan lebih optimal.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat menilai efektivitas kolaborasi organisasi masyarakat dalam pembangunan inklusif di daerah lain untuk memungkinkan perbandingan antarwilayah. Kajian juga perlu melibatkan perspektif penerima manfaat guna menilai perubahan sosial secara lebih komprehensif. Selain itu, analisis mengenai penguatan kelembagaan, digitalisasi data, keberlanjutan program, serta integrasi GEDSI dalam kebijakan daerah penting dilakukan untuk memahami bagaimana organisasi masyarakat dapat mempertahankan peran strategisnya dalam pembangunan inklusif di tingkat local.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., ZA, I., & Maksum, A. (2022). Strategi Aisyiyah Untuk Meningkatkan Kehadiran Perempuan dalam Politik. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.796>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2025). *Kabupaten Garut dalam Angka*.
- Baihaqi, H. (2025, September). Hanya 34,61% Warga Garut Tinggal di Rumah Layak Huni, Terendah Kedua Jabar. *MSN Berita*, 1. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/hanya-34-61-warga-garut-tinggal-di-rumah-layak-huni-terendah-kedua-jabar/ar-AA1KqVU9>
- BPS Kabupaten Garut. (2024). *Berita Resmi Statistik*.
- Danubrata, K. (2022, September 26). *Perpres 111/2022: Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.



- <https://jdih.maritim.go.id/perpres-no-111-tahun-2022>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut. (2024, March 28). *Berita Daerah - Pemkab Apresiasi Musrenbang Perempuan Dan Kelompok Rentan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. DISKOMINFO GARUT. <https://api.garutkab.go.id/news/pemkab-apresiasi-musrenbang-perempuan-dan-kelompok-rentan-dalam-perencanaan-pembangunan-daerah>
- Diskominfo Garut. (2024, June 25). Berita Daerah - Wujudkan Aksesibilitas Bagi Disabilitas, PDA Garut Gelar Refreshment Penyedia Layanan Kerja. *DISKOMINFO GARUT*.
- Fauzi, S. (2025, May 28). *SDGs adalah Agenda Global untuk Masa Depan Berkelanjutan, Ini Penjelasannya*. AnjirlInside.
- Garut Satu Data. (2024). *Jumlah Organisasi Wanita (GOW) di Kabupaten Garut - Tahun 2024*.
- Hasmiati, Rita, & Amiruddin. (2021). Dakwah Aisyiyah melalui kader Tuberkulosis (Tb) care. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1). <https://share.google/k6EiwVHY7tYun7mgT>
- Hazim, H., & Fihayati, Z. (2022). Faith-Based Women's Organization Philanthropy in Fighting against the COVID-19 pandemic and Its Impacts: The Case of Aisyiyah in Sidoarjo, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(1), 83–94. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.11817>
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosiologi : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1, 45363.
- Huripah, E., Kesejahteraan, P., Bandung, S., Politeknik, R., Sosial Bandung, K., Dwi, E., & Kesejahteraan, W. P. (2021). Strategi Kapabilitas Relasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Garut: Penguatan Aspek Kolaborasi dan Kemitraan Lembaga. *LINDAYASOS: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 03(1). <https://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/lindayasos/article/view/390/308>
- Milki. (2024, December 21). PDA Garut Raih Predikat Nasional, Unggul dalam Program Inklusi GEDSI. *Garut Berkabar*.
- Mimar, N. H. (2025). *Pengarusutamaan Gender Dalam Aktivisme Perempuan Perspektif Local Wisdom di Kabupaten Garut (Studi kasus FATAYAT NU, AISIYAH, dan PERSISTRI)*.
- Naibaho, M. A., & Siregar, H. (2023). Kepemimpinan Inklusif Dalam Proses Pembangunan Komunitas Dengan Mendorong Partisipasi Dan Pemberdayaan Anak Muda. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 18–25. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i4.1090>
- News Redaksi. (2025, June 13). Garut Catat Penurunan Stunting Tertinggi di Jawa Barat Tahun 2025. *Radar Garut*. <https://radargarut.id/2025/06/13/garut-catat-penurunan-stunting-tertinggi-di-jawa-barat-tahun-2025/>
- Nur Kholisatun, Fika Ratna Pratiwi, & Moh. Nurhakim. (2024). Aisyiyah Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Kesetaraan Gender. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3), 306–319. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i3.1272>
- Papap, H. (2024). *PD Aisyiyah Garut Unggul dalam Program Inklusi GEDSI Jadi Juara Umum Nasional 2024*. <https://kabargarut.pikiran-rakyat.com/kabar-qarut/pr-3218898928/pd-aisyiyah-garut-unggul-dalam-program-inklusi-gedsi-jadi-juara-umum-nasional-2024>
- Pasciana, R., Ismira Febrina, R., Sartika Iriany, I., Juliasih, L., & Karmila, M. (2024). *Komunikasi Pembangunan dalam Implementasi Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Cirebon*. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/1013>
- Pasciana, R., Juliasih, L., Sartika Iriany, I., Karmila, M., & Febrina, R. I. (2024). Transformasi Sosial melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. *Az Zahra*. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v5i1.38557>
- Pempatan, D., Rendang, K., Karangasem, K., Kasus, S., Disabilitas, M., Putri, A. A., Pratiwi, K., Ketut Winaya, I., Ni, R., & Supriliyani, W. (2023). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Inklusif di. In *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* (Vol.



- 1, Issue 3). <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Purwanti, I., Suyanto, U. Y., Abadi, M. D., & Faizah, E. N. (2023). Sekolah Perempuan : Pemberdayaan Organisasi Aisyiyah Kabupaten Lamongan Melalui Program Womanpreneur Berbasis E-Commerce. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(6), 5402. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i6.17703>
- Selan, S., Tasuib, R., Jehamat, L., Nope, H. A., Gero, H. M. E., & Meka, C. E. (2024). *Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Pemunggiran Sosial Masyarakat Urban (Studi pada PKL di Pantai Tedis Kota Kupang)*. Source: E-Journal UNDIP <https://share.google/1rO9zbzjG4IO1c1xq>
- Sujana, F. H., Wijaya, A. A. M., & Sa'ban, L. M. A. (2025). Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau. *Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Humaniora*, 9. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>